

Judul : Komisi III Bakal Evaluasi Mahkamah Agung
Tanggal : Sabtu, 01 Desember 2018
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 3

Komisi III Bakal Evaluasi Mahkamah Agung

Buntut OTT di PN Jaksel

JAKARTA-Komisi III DPR RI bakal melakukan rapat evaluasi bersama Mahkamah Agung (MA), Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bansoet) telah memberikan diinstruksikan langsung Hal itu buntut dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bansoet) menyatakan, dirinya telah meminta Komisi III DPR RI menggelar rapat evaluasi bersama MA. "Ini tentu kita serahkan kepada Komisi III untuk melakukan rapat konsultasi dengan MA untuk mencari solusi terhadap beberapa hakim nakal yang kemudian terkena OTT. Ya tentu ini kan sangat menciderai wajah pengadilan kita," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Menurut Bansoet, kasus OTT terhadap hakim ini merupakan persoalan perilaku individu sehingga tidak bisa digeneralisasi terhadap hakim-hakim lain. Ia juga mendorong Komisi

Yudisial (KY) terus melaksanakan fungsinya dalam pembinaan dan pengawasan terhadap hakim. "Menurut saya, apa yang sudah diberikan oleh negara kepada KY, kewenangannya cukup bagus. Tinggal KY-nya yang harus terus-menerus melaksanakan tugas-tugas pokoknya, melakukan pembinaan dan pengawasan," jelasnya.

Bansoet juga menyatakan, akan segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim. Menurutnya, RUU tersebut saat ini masih diproses di Komisi III.

"Dan sebelumnya saya dengan ketua komisi atau pimpinan Komisi III sudah ada pembahasan akan segera menyelesaikan dalam masa sidang depan. Sekarang-kurangnya sebelum masa sidang kita berakhir kita sudah selesai, tapi kalau bisa pas sidang tahun depan bisa diselesaikan," paparnya.

Sementara, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menyatakan, tidak bangga dengan hasil OTT KPK terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Justru KPK saat ini dinilai

melenceng dalam hal memberantas korupsi. "Jadi gini ya, KPK sudah salah jalan, KPK ini sudah salah langkah, sebaliknya dan sebaliknya KPK sudah lempar handuk dengan mengatakan minta presiden bikin Perppu, sebenarnya KPK itu sudah menyerah," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Fahri mengusulkan, Presiden Joko Widodo supaya membuat Perppu yang mampu mengintegrasikan banyak lembaga dalam satu payung dan bisa menjadi raksasa yang menjadi tempat orang melaporkan malpraktek di dalam pelayanan publik, pengadaan barang, tender dan sebagainya. "Jadi KPK, komas HAM, Ombudsman, LPSK, itu di Komnas Perempuan, itu di Komisi Pemberantasan Korupsi, itu di lembaga menjadi lembaga komplain, kalau saya itu desainnya," ucapnya.

"Itu yang terjadi di banyak negara, sehingga betul-betul efek dari lembaga lembaga besar itu pada perbaikan indeks persepsi korupsi bangsa kita. Itu contoh yang ada di Korea

Selatan, kalau Pak Jokowi mau itu dahsyat itu," tambah Fahri.

Dia berujar, cara KPK memberantas korupsi dengan OTT adalah cara salah dan semakin menunjukkan bahwa KPK frustrasi. Fahri geram dengan pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo yang bangga menyebut KPK mudah bila ingin menangkap koruptor setiap saat. "Masak Ketua KPK bilang kalau KPK mau bisa OTT setiap hari, kalau KPK dikasih aparat lebih banyak dia bisa OTT setiap hari, itu kan frustrasi. Artinya KPK itu gagal, harusnya kan kalau ketua KPK nya bener coba kalian lihat gara gara KPK susah kita cari orang korupsi," ucapnya.

Mestinya, kata Fahri, KPK memberikan pernyataan yang membanggakan. Misalnya karena ada lembaga anti rasuah, tidak ada yang berani melakukan korupsi di negara. "Lho Ketua KPK malah bilang kalau kita mau setiap hari kita ada OTT, artinya elu gagal dong bos, ini orang gagal minta tepuk tangan terus, gila ini! otak kita ini diputar nya ke arah yang salah! suruh memberantas

korupsi tapi tiap hari bilang kalau KPK mau bisa setiap hari ditangkap, lho yang bener elu ngomong!" tegas Fahri.

Politikus yang berkonflik dengan PKS tersebut minta KPK 'lempar handuk' dan Presiden Jokowi membuat lembaga gabungan baru yang lebih efektif guna menghapus masalah korupsi. "Sebab gak bisa begini cara kita bernegara, harus ada prestasi dong, ini pakai uang rakyat tiap hari gak ada prestasi, gimana sih, minta uang tambah banyak terus tiap hari. Jadi udalah KPK lempar handuk, tangkap sama Presiden, kalau tangkap sama Presiden sekarang cakep, Pak Jokowi kalau berani wah saya bela Pak Jokowi," tukasnya.

Lebih lanjut, Fahri mengusulkan para capres nanti membuat gebrakan guna membenahi masalah korupsi yang sudah akut. "Menurut saya kalau bisa capres capres siapkan strategi dalam 100 hari pertama bagaimana strategi pemberantasan korupsi, 100 hari pertama waktu mereka berkuasa dan dilantik 20 Oktober tahun depan 2018 itu siapin," tuntasnya. (aen)